BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good government governance)*, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh (LAN2000). Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengeloalaan keuangan negara/daerah. (Abdul Rohman:2007)

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan diubah dengan Perpu No. 3 Tahun 2005 serta UU No. 25 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004, menjadi tonggak awal otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, system pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel.

Beberapa prioritas perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan, terutama dalam aspek anggaran, akuntansi, dan pemeriksaan. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola sistem dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran cerdas melalui inovasi sistem akuntansi. (Indra Bastian 2007:2)

Sejalan dengan tuntutan reformasi disegala bidang pengelolaan keuangan daerah pun mengalami reformasi. Tuntutan masyarakat era reformasi terhadap pelayanan public yang ekonomi, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan responsif semakin besar. Keleluasaan penggunaan dana-dana yang telah meningkat cukup signifikan harus mendapatkan pengelolaan yang cukup baik. Salah satu prinsip dalam mewujudkan *Good Governance* adalah adanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian adalah wajar bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah perlunya reformasi pengelolaan keuangan daerah dikenal adanya 2 macam pengelolaan keuangan yaitu pengelolaan umum dan pengelolaan khusus. (Tjahjanulin Domai 2002:53)

Sumarlin (2004) mengatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance adalah penyelenggaraan negara tak terlepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan Negara, karena aspek keuangan Negara menduduk posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa, baik dari segi sifat, jumlah maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan,

dan kestabilan perekonomian bangsa. Hal inilah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menurut Guthrie *et al.*,1998; Guarini, 1999; dalam Steccolini, 2002 Undang-undang yang mengatur mengenai akuntabilitas sector public yang sedang mengalami perubahan mendasar, dengan penekanan pada peranan sistem akuntansi dalam pengukuran dan pengevaluasian baik kinerja keuangan maupun pelayanan, mendorong pengungkapan dan pengkomunikasian hasil-hasil kepada stakeholders. Sebagai konsekuesninya, diberbagai negara, pelaporan ekternal sedang ditransformasikan agar lebih konsisten dengan kebutuhan akuntabilitas baru.

Membahas mengenai akuntabilitas keuangan daerah yaitu merupakan proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai evaluasi tahun berikutnya. Menurut Abdul Halim (2007:87)

Adapun ciri-ciri dari akuntabilitas yang efektif antara lain : 1. Akuntabilitas harus utuh dan menyeluruh (dalam arti tanggung jawab terhadap pokok dan fungsi intansi, serta program pembangunan yang dipercayakan kepadanya termasuk pelayanan BUMN/D yang berada dibawah wewenangnya), 2. Mencangkup aspek yang menyeluruh mengenai aspek integritas keuangan, ekonomis, efisien, dan sesuai prosedur, 3. Akuntabilitas merupakan bagian dari

sistem manajemen untuk menilai kinerja maupun unit instansi, 4. Akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal, untuk menjamin keabsahan, objektivitas dan ketepatan waktu penyampaian informasi, 5. Adanya penilaian yang efektif dan independen terhadap akuntabilitas suatu isntansi , 6. Adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas. Menurut Abdul Halim (2007:87)

Menurut Abdul Halim (2007:40) untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang ada. Selain itu adanya penyajian laporan keuangan atau laporan neraca yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas pemerintahan dapat meningkatkan nilai akuntabilitas yang baik.

Menurut Mardiasmo (2002:171) Laporan keuangan merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability & stewardship*).

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 31, Gubernur/Bupati/Walikota harus membuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan). Laporan keuangan ini terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut Mulyono (2006) Laporan neraca atau penyajian neraca daerah adalah penyajian laporan keuangan yang memberikan informasi tentang asset, kewajiban, ekuitas dana pemerintah pada tanggal tertentu. Adanya KSAP yang kemundian ditetapkannya Buletin Teknis No 02 Tahun 2005 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemda, langkah-langkah penyusunan neraca daerah yang selanjutkan dijadikan indicator adalah sebagai berikut : 1. Menentukan ruang lingkup pekerjaan, 2. Menyiapkan formulir-formulir berikut petunjuk pengisiannya, 3. Memberikan penjelasan kepada tim yang akan melakukan penyusunan neraca, 4. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan inventarisasi asset dan kewajiban, 5. Melakukan pengolahan data dan klasifikasi asset dan kewajiban sesuai dengan SAP, 6. Melakukan penilaian asset dan kewajiban, 7. Menyajikan akun-akun asset, kewajiban dan ekuitas berikut jumlahnya dalam format neraca.

Akuntabilitas merupakan konsep yang komplek yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertical. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan

ekternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Menurut Mardiasmo (2009)

Selain penyajian neraca daerah ada juga pengawasan intern yang akan mendukung dan mempengaruhi terciptanya akuntabilitas keuangan yang baik, akuntabel. Pengawasan intern adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau manajer puncak dan atau pimpinan atau manajer unit atau satuan kerja dilingkungan organisasi dan atau unit satuan kerja masing-masing. Menurut Nawawi (2002)

Untuk konsep pengawasan intern terdiri dari lima komponen (unsur-unsur) yang saling berhubungan yang akan menunjang pencapaian tujuan perusahaan atau instansi yaitu : 1. *Control Environment* (Lingkungan pengendalian) merupakan komponen yang berperan dalam membangun atmosfer (iklim), 2. *Risk Assement* (penaksiran resiko) resiko tidak tercapainya *financial reporting objectives, compliance,* dan *operasional objective*, 3. *Control Activities* (Aktivitas Pengendalian) merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan dilaksanakannya kebijakan manajemen dan bahwa resiko sudah diantisipasi, 4. *Information & Communication* (Informasi dan Komunikasi) menjelaskan bahwa sistem informasi sangat penting bagi keberhasilan dan peningkatan mutu operasional organisasi, 5. *Monitoring* (Pemantauan) mengedepankan kebutuhan manajemen untuk monitor sistem pengendalian intern melalui *internal control system* itu sendiri. Menurut COSO

Pengawasan dapat membantu suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, dan mencegah hilangnya sumber daya. Dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Laporan keuangan yang dapat dipercaya menjadi dasar pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah yang telah dilakukan dalam suatu periode. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik, hendaknya disertai dengan pengelolaan yang tertib dan disiplin, sehingga tujuan atau sarana dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Indra Bastian (2001:70)

Menurut Meutia Rahmi (2009) fenomena yang kerap terjadi yaitu mengenai penyajian laporan keuangan atau penyajian neraca kualitas akuntansi pelaporan keuangan pada tingkat Pemerintah Daerah memburuk. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurun sementara LKPD dengan status *disclaimer* dan tidak wajar justru semakin naik. Kebijakan otonomi daerah yang menambah kewenangan pemerintah daerah ternyata membuat penyelenggaraan keuangan semakin menurun.

Menurut data BPK, LKPD yang mendapat opini WTP pada tahun 2004 mencapai 21 daerah dan tahun lalu tinggal delapan (8) daerah. Adapun daerah yang dicap WDP oleh BPK pada tahun 2004 mencapai 249 daerah,naik menjadi 283 di tahun 2007, lalu turun menjadi 137 berdasarkan evaluasi sementara tahun

2008. Sementara LKPD yang memperoleh opini disclaimer pada tahun 2004 tercatat tujuh (7) daerah dan naik menjadi 14 daerah di tahun 2008. Dan LKPD dengan opini tidak wajar pada tahun 2004 sebanyak sepuluh daerah, menjadi 59 di tahun 2007 dan terakhir berdasarkan data sementara tahun 2008 turun menjadi lima daerah.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD provinsi selama semester I tahun 2012, menunjukkan kasus-kasus pemeriksaan yang sering terjadi antara lain permasalahan pengadaan barang dan jasa berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 61 kasus senilai Rp21,44 miliar. Kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan pekerjaan sebanyak 39 kasus senilai Rp9,09 miliar, serta aset daerah yang dikuasi pihak lain sebanyak 12 kasus senilai Rp108,08 miliar. Sementara itu, hasil pemeriksaan atas LKPD kabupaten/kota selama semester I tahun 2012 juga menunjukkan kasus-kasus pemeriksaan yang sering terjadi, antara lain kekurangan penerimaan daerah sebanyak 455 kasus senilai Rp230,55 miliar, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 322 kasus senilai Rp72,82 miliar, serta potensi kerugian daerah akibat piutang/pinjaman atau dana bergulir tidak tertagih sebanyak 80 kasus senilai Rp119,56 miliar.

Secara umum, hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2011 menunjukan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan dibanding LKPD tahun 2010 yang diperiksa pada semester I tahun 2011. Jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP mengalami peningkatan dari 34 menjadi 67. Meskipun jumlah LKPD yang

memperoleh WTP mengalami peningkatan, namun dibandingkan dengan jumlah seluruh LKPD, LKPD yang memperoleh opini WTP tersebut relatif masih kecil, yaitu 16 persen.

Menurut Madina Nusrat dan Direktur Jenderal bina Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Timbul Pudjianto (2012) masih banyak pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yang laporan keuangannya buruk, setidaknya ada 40 persen dari 524 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang laporan keuangannya buruk. Ada dua masalah utama yang menyebabkan pelaporan keuangan daerah masih buruk.

Masalah pertama, sumber daya manusia yang menangani pengelolaan keuangan daerah di sebagian besar pemerintahan daerah tidak ditangani oleh tenaga professional. Masalah kedua, pencatatan asset daerah masih kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Rusaknya neraca daerah adalah akibat asset-aset yang tidak dicatat dengan baik.

Menurut bapak Asep Mulyadi S.pd berdasarkan wawancara fenomena yang terjadi yaitu masih kurangnya penerimaan daerah, volume pekerjaan atau barang serta potensi kerugian daerah karena piutang atau pinjaman atau dana bergulir yang tidak tertagih.

Menurut Diamond (2002) dalam Budi Mulyana (2006:69) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berupa neraca adalah penting, sebab pemerintah umumnya mempunyai jumlah asset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi

fiskal dan akuntabilitas. Menurut Halim (2002) dalam Budi Mulyana (2006:69) seiring dengan tuntutan yang dikehendaki dalam PP No. 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, neraca pembukaan (neraca yang pertama kali dibuat) menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah, sebab bila Sistem Informasi Keuangan Derah (SIKD) ingin menghasilkan laporan keuangan yang lengkap pada akhir tahun, maka terlebih dahulu disusun neraca pembukaan *(opening balance)*, apabila hal ini tidak diantisipasi oleh Pemerintah Daerah maka bukan tidak mungkin reformasi dalam keuangan daerah terkesan lamban dan mandul. Fenomena yang muncul saat ini berkaitan dengan penyajian neraca adalah dalam Budi Mulyana (2006:69): a) Belum dimilikinya neraca oleh Pemerintah Daerah karena sistem dan pelaporan yang selama ini ada belum kondusif ke arah tersebut, b) Menurut Halim (2002) bagimana pengertian awal dan akhir pada neraca pemerintah daerah, mengingat organisasi pemerintah daerah sudah eksis jauh sebelum masa reformasi

Menurut Hakim dan Halim (2008) dalam Sukhemi (2010:91-92) bahwa penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, dengan tidak adanya laporan keuangan memperlihatkan lemahnya akuntabilitas, tuntutan akuntabilitas di sektor publik terkait dengan perlunya dilakukannya transparansi dan pemberi informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Menurut (PP 60 tahun 2008) Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan

menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian, maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertin, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

Menurut (Wawan dan Lia:2009) Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas – tugas organisasi. Menurut arifin sabeni dan iman gozali (1997;67) pengawasan intern merupakan suatu alat pengawasan dari pemimpin organisasi yang berangkutan untuk mengawasi apakah kegiatan – kegiatan bawahannya telah sesuai dengan rencana – rencana dan kebijakan yang telah ditentukan.

Seperti yang diungkapkan Maolani S,D 2012. Keberadaan lembaga-lembaga pengawasan saat ini dinilai tak ubahnya seperti kotak pos saja. Berbagai lembaga berfungsi hanya untuk menerima pengaduan sehingga para pegawainya seperti mendapatkan gaji buta, pengawasan atasan yang lemah terhadap bawahan.

Akibatnya, integritas bawahan merosot. Hukum yang menjadi alat kekuasaan juga menjadi faktor tersebut.

Pada 02 mei 2012 Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Bandung soroti kinerja pejabat di enam Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemkot Bandung diantaranya Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu (BPPT), Bagian Hukum, dan Inspektorat. Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dewan perwakilan rakyat daerah mendapatkan dan menyoroti soal rendahnya kualitas pembangunan dan kelemahan perencanaan dalam menetapkan target-target capaian kinerja, karena kegagalan dalam perencanaan sama halnya dengan merencanakan kegagalan. (Erwan Setiawan 2012)

Berdasarkan wawancara menurut bapak Dany Abdulrahman dalam akuntabilitas keuangan daerah fenomena yang terjadi yaitu sistem informasi yang membangun akuntabilitas keuangan belum handal sehingga informasi yang akan diberikan terbatas pada masa lalu ataupun dimasa serta akuntabilitas keuangan tidak sepenuhnya tercapai.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budi Mulyana (2006) tentang pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa penyajian neraca daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah maka dari itu penyajian neraca daerah harus berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah.

Penelitian sebelumnya yang juga dilakukan oleh Dadang Sadeli (2008:10) mengenai profesionalitas pengawasan fungsional intern terhadap pelaksanaan audit pemerintah dan implikasinya kepada akuntabilitas keuangan isntansi pemda menyatakan bahwa pengawasan intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atau menguji kembali apakah penyajian neraca daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan dan pengawasan intern berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan serta pengaruh penyajian neraca daerah dan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, maka penulis melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah".

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dpeneliti mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya penerimaan daerah, volume pekerjaan atau barang serta potensi kerugian daerah karena piutang atau pinjaman atau dana bergulir yang tidak tertagih.
2. Sumber daya manusia yang menangani pengelolaan keuangan daerah di sebagian besar pemerintahan daerah tidak ditangani oleh tenaga professional.

3. Masalah pencatatan asset daerah masih kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah.
4. Pengawasan atasan yang lemah terhadap bawahan. Kendalanya, integritas pimpinan merosot.
5. Sistem informasi yang membangun akuntabilitas keuangan belum handal.
6. Akuntabilitas keuangan tidak sepenuhnya tercapai (akuntabilitas merosot).

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masa1lah yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh penyajian neraca daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada SKPD Kota Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada SKPDKota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh penyajian neraca daerah dan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada SKPD Kota Bandung.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dari berbagai informasi terkait dengan penyajian neraca daerah dan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada SKPD Kota Bandung yang kemudian akan diolah dan dianalisis untuk mencapai hasil yang diharapkan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penyajian neraca daerah terhadap akuntabilitas keuangan pada SKPD Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui besarnya pengauh pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada SKPD Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penyajian neraca daerah dan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan pada SKPD Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini penulis berharap bahwa penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat –manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

   Dengan melakukan penelitian ini penulis akan lebih dapat memahami tentang pengaruh penyajian neraca daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan juga pengaruh pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

2. Bagi Perusahaan

   Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan kepada perusahaan atau instansi mengenai bagaimana menyajian neraca

daerah dan dan melaksanakan pengawasan intern yang baik guna mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

   Memberikan informasi tentang keterkaitan antara penyajian neraca daerah, pengawasan intern dengan akuntabilitas keuangan daerah.

2. Bagi Peneliti Lain

   Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan referensi dan informasi yang bermanfaat khususnya mengenai pengaruh penyajian neraca daerah dan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah dengan penelitian ini apabila ada yang bermaksud untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bandung yang menjadi observasi penelitian pada 17 Dinas SKPD Kota Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2012 sampai dengan Agustus 2013. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membuat rencana jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan sampai ketahap akhir yaitu pelaporan hasil penelitian. Secara lebih rinci waktu penelitian dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Des 2012	Jan 2013	Feb 2013	Maret 2013	April 2013	Mei 2013	Juni 2013	Juli 2013	Agustus 2013
1	**Pra Survei :**									
	a. Persiapan Judul	■								
	b. Persiapan Teori	■								
	c. Pengajuan Judul	■								
	d. Mencari Perusahaan	■								
2	**Usulan Penelitian :**									
	a. Penulisan UP		■							
	b. Bimbingan UP		■							
	c. Seminar UP			■						
	d. Revisi UP			■	■					
3	Pengumpulan Data				■	■				
4	Pengolahan Data				■	■	■			
5	**Penyusunan Skripsi :**									
	a.Bimbingan Skripsi							■	■	
	b. Sidang Skripsi								■	
	c. Revisi Skripsi								■	■
	d.Pengumpulan Draft Skripsi									■